

ABSTRAK

Rizki apriliani, 1228010186, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bandung.

Pertanian organik saat ini bukan hanya tentang sebuah trend, melainkan menjadi bagian dari arah pembangunan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas pangan. Di Kabupaten Bandung, kebijakan pengembagn pertanian organik sudah dituangkan secara resmi melalui Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2025, yang menargetkan perluasan lahan pertanian organik serta peningkatan kapasitas petani, khususnya pada komoditas tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Namun, meski regulasinya sudah tersedia, pelaksanaanya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang nyata dan perlu dikaji secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pertanian organik pada sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bandung berjalan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanian organik di Kabupaten bandung secara keseluruhan belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, penyuluhan sudah pernah dilakukan namun belum bersifat rutin, merata, dan belum menyentuh kebutuhan teknis spesifik petani. Dari aspek sumber daya, bantuan yang diberikan belum mencukupi kebutuhan lahan dan belum disertai pendampingan teknis yang memadai. Dari aspek disposisi, petani pada umumnya masih bersikap pragmatis dan memilih sistem pertanian campuran karena belum ada jaminan yang cukup kuat dari pemerintah terkait hasil panen dan keberlangsungan bantuan. Sementara dari aspek struktur birokrasi, alur koordinasi formal sudah terbentuk namun efektivitasnya sangat bergantung pada keaktifan

kelompok tani di tingkat bawah yang kondisinya saat ini banyak yang sudah tidak berjalan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pertanian organik memerlukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan pola komunikasi, peningkatan sumber daya, pembangunan kepercayaan dengan petani, hingga revitalisasi kelembagaan kelompok tani sebagai ujung tombak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pertanian Organik, Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Kabupaten Bandung, Edwards III.

